

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas agama Islam dituntut selalu meningkatkan sumber daya manusianya, baik Iman dan Taqwa (IMTAQ) maupun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pengembangan madrasah menuju sekolah umum berciri khas agama Islam tersebut sejatinya telah dirancang sejak Mukti Ali menawarkan konsep pengembangan madrasah melalui kebijakan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri Agama, (Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri) yang berusaha mensejajarkan kualitas madrasah dengan non madrasah dengan porsi kurikulum 70% madrasah : 30% umum. Selanjutnya periode Menteri Agama Munawir Sadzali dikembangkan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) untuk memberikan keseimbangan pada lulusan madrasah, sedangkan pada periode Menteri Agama Tarmidzi Taher menawarkan adanya suatu konsep madrasah sebagai sekolah umum yang bercirikan Islam.¹

Salah satu pembentuk keunggulan madrasah diwadahi dalam kelompok mata pelajaran matan lokal. Muatan lokal telah dimulai pada Kurikulum 1984 dan menjadi andalan sekaligus takhasus dari madrasah dalam kegiatan pendidikan di

¹ Ainurrofiq Dawam dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Listafariska Putra, Jakarta, 2005, Cet. II, hlm. 56.

madrasah, terutama madrasah yang didirikan oleh masyarakat yang menggunakan dua model kurikulum (kurikulum kementerian agama dan pondok pesantren salafiyah). Muatan lokal lebih diintensifkan lagi pelaksanaannya dalam kurikulum 1994 yang tidak lagi disisipkan pada setiap bidang studi, tetapi menggunakan pendekatan monolitik berupa bidang studi, baik bidang studi wajib atau pilihan. Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, muatan lokal di madrasah lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, modelnya lebih beragam dan sistemnya tidak terpusat lagi, sehingga pengelolaannya menjadi desentralisasi.²

Peraturan kurikulum secara eksplisit telah diatur oleh pemerintah melalui lampiran peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Peraturan ini menjelaskan bahwa Muatan Kurikuler dalam KTSP terdiri atas muatan nasional dan muatan lokal.

Muatan kurikulum pada tingkat nasional terdiri: Al-Qur'an Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, PPKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Matematika, Pendidikan Seni, Sejarah Indonesia, Prakarya atau Kewirausahaan.

Kedua Muatan Lokal yang wajib diikuti diikuti di MA NU TBS Kudus antara lain; tafsir, qiro'ah sab'ah, hadits, tauhid, tasawuf, fiqih, nahwu, balaghoh, mantiq, ilmu nafsi dan tarbiyah, ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa arab, qiroatul kutub, ilmu mantiq.³

Selain kelompok muatan nasional dan muatan lokal yang wajib bagi peserta didik, untuk tingkatan Aliyah ditambah dengan kelompok mata pelajaran

² E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Cet.VI, hlm. 66-67.

³ Dokumen MA NU TBS Kudus diakses Tanggal 17 Mei 2017

peminatan, termasuk bimbingan konseling dan ekstra kurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Muatan lokal yang dikembangkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan/atau satuan pendidikan dapat berbentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah tempat tinggal peserta didik dan keberadaan madrasah.

Pada bagian mata pelajaran kelompok mata pelajaran yang berdiri sendiri, pada kelompok B sebagai mata pelajaran muatan lokal dalam hal pengintegrasian tidak dapat dilakukan. Sedangkan bimbingan konseling dapat diselenggarakan melalui tatap muka di kelas sebagai muatan kurikulum yang ditetapkan pada tingkat satuan pendidikan.⁴

Muatan lokal dalam kurikulum nasional tidak mengubah esensi tujuan pendidikan nasional. Artinya, tujuan pendidikan nasional dan tujuan kelembagaan pendidikan (tujuan institusional) tetap menjadi kerangka acuan bagi pelaksana muatan lokal. Justru dengan adanya muatan lokal akan sangat membantu madrasah dalam memberikan pengalaman-pengalaman yang belum mesti terdapat pada standar isi yang ada, sebab struktur kurikulum dalam madrasah terdiri dari unsur, yaitu standar isi, muatan lokal dan pengembangan diri.⁵

Unsur-unsur dalam kurikulum pendidikan pada madrasah memiliki perbedaan dengan struktur kurikulum di sekolah, khususnya pada aspek muatan lokal. Sebagai sekolah berciri keagamaan, madrasah memiliki banyak ragam muatan lokal agama (fiqih, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan islam, qur'an dan

3 Peraturan menteri pendidikan nasional No. 61 tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan.

4 Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1991, Cet. II, hlm. 173.

hadits, bahasa arab, dan kitab-kitab salafiyah). Sebagaimana dalam konteks pendidikan keagamaan, bahwa secara umum pendidikan keagamaan merupakan sub sistem dari sistem pendidikan nasional, yang eksistensinya disebut dalam Pasal 12 Ayat 1 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”.⁶

Pasal 7 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan : “Kelompok mata pelajaran agama dan akhlaq mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C/SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan”.⁷

Posisi muatan lokal dikuatkan lagi dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 dijelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan kurikulum untuk tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah seperti kurikulum muatan lokal mata pelajaran

5 Nana Sudjana, *Loc. cit.*

6 Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2003, Cet. I, hlm. 14.

fiqih dapat disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan satuan pendidikan yang bersangkutan seperti halnya implementasi kurikulum muatan lokal mata pelajaran fiqih dalam mewujudkan standar kelulusan di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus.⁸

Kurikulum muatan lokal merupakan satu kesatuan utuh yang tak terpisahkan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum muatan lokal merupakan upaya agar penyelenggaraan pendidikan di daerah dapat disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional, sehingga pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal mendukung dan melengkapi KTSP. Secara umum, muatan lokal bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap hidup kepada peserta didik agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungan dan masyarakat sesuai dengan nilai yang berlaku di daerah masing-masing dan mendukung kelangsungan pembangunan daerah serta pembangunan nasional.⁹

Dalam konteks pendidikan agama, materi khusus atau yang sering dikenal dengan istilah program muatan lokal merupakan upaya atau terobosan program pendidikan yang secara khusus disiapkan untuk para peserta didik agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dewasa ini. Hal ini menuntut madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam agar mampu mengembangkan kurikulum pendidikan Islamnya baik melalui celah muatan lokalnya maupun

⁸ Tim Redaksi Ma'arif Press, *Kompilasi Kebijakan Pendidikan Nasional*, PW LP NU Jawa Tengah, Semarang, 2006, Cet.1, hlm. 98-109.

⁹ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Sebuah Panduan Praktis*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 274-275.

dengan menambah waktu belajar yang dikhususkan untuk materi-materi keislaman, sesuai visi dan misi lembaga pendidikan masing-masing.

Madrasah Aliyah NU TBS Kudus merupakan salah satu madrasah di Kabupaten Kudus yang banyak diminati oleh calon siswa lulusan dari Madrasah Tsanawiyah. ini dapat dilihat dari animo masyarakat Kudus yang banyak memasukkan anak-anaknya di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus, dimana latar belakang asal siswa tidak hanya dari kabupaten Kudus akan tetapi juga dari luar Kudus. Data statistik peserta didik pada tahun 2016 jumlah siswa kelas X sejumlah 552, kelas XI sejumlah 399, kelas XII sejumlah 407, sehingga total jumlah peserta didik 1358 siswa.

Orang tua wali murid memasukkan anak-anaknya untuk masuk ke Madrasah Aliyah NU TBS Kudus ini dikarenakan selain pola manajemen madrasah yang baik, madrasah ini memiliki para pendidik yang berlatar belakang para Kyai dan para sesepuh yang dapat diharapkan ilmunya yang bermanfaat disamping karena memiliki muatan lokal mata pelajaran berbasis agama yang cukup banyak dan diharapkan menjadi nilai plus para alumninya. Berikut data penerimaan siswa MA NU TBS Kudus 5 tahun terakhir : ¹⁰

Tabel. 1.1. Data Penerimaan Siswa MA NU TBS Kudus

No	Tahun Pelajaran	Penerimaan		Jumlah Peserta Didik			Total peserta didik
		Pendaftar	Diterima	Kelas X	Kelas XI	Kelas XII	
1	2011 / 2012	466	423	423	332	320	1.075
2	2012 / 2013	447	413	413	375	314	1.102
3	2013 / 2014	450	406	406	375	359	1.140
4	2014 / 2015	462	460	408	406	375	1.189
5	2014 / 2015	496	490	398	405	406	1.209

¹⁰ Dokumen MA NU TBS Kudus tahun 2016/2017

6	2016 / 2017	556	552	552	399	407	1.358
---	-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Sumber : Dokumen MA NU TBS Kudus

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa MA NU TBS jumlah siswanya selalu bertambah setiap tahunnya. Sementara program kurikulum Madrasah Aliyah NU TBS Kudus yang menjadi daya tarik masyarakat ini berbeda dengan program kurikulum pada madrasah-madrasah pada umumnya. Karena kurikulum yang diterapkan menggunakan kurikulum kombinasi yaitu dari Departemen Agama dan Kurikulum Departemen Nasional.¹¹

Dari pemikiran dan fakta diatas, penulis tertarik untuk mengungkapkan dan membuktikannya dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul *“Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017”*.

B. Penegasan Istilah

Agar judul tesis ini lebih mudah difahami serta untuk menghindari terjadi salah persepsi, maka dibawah ini akan dipaparkan penjelasan mengenai istilah yang ada dalam judul sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi mempunyai arti yaitu : aplikasi, pelaksanaan, penerapan, pengalaman, pengejawantahan, praktek, dan rekayasa.¹²

10 Data Dokumentasi MA NU TBS Kudus, Tahun 2016-2017, hlm.13.

11 Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet. II. hlm. 246.

Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan muatan lokal berbasis agama di MA NU TBS Kudus.

2. Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan baik sekolah maupun madrasah¹³ Muatan lokal adalah program pendidikan yang isinya berkaitan dengan kondisi daerah yang wajib dipelajari oleh murid sekolah di daerah itu.¹⁴

Berbasis dari kata dasar basis yang berarti pokok, dasar, asas, pondasi, landasan atau pun pangkal. Penekanannya pada aspek keagamaan. Jadi kurikulum muatan lokal agama adalah sejumlah mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan yang isinya lebih menekankan pada aspek keagamaan.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan seperangkat kompetensi yang harus dikuasai lulusan yang menggambarkan profil lulusan secara utuh. Standar kompetensi lulusan menggambarkan berbagai aspek kompetensi yang harus dikuasai, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor, termasuk kemampuan membaca dan memahami muatan lokal berbasis agama.

Standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan visi dan misi Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu, asumsi berupa proporsi atau pernyataan yang dianggap rasional dapat juga digunakan sebagai acuan dalam penentuan standar kompetensi kelulusan. Menurut PP RI No. 19

¹³ Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1991, hlm. 172.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 186.

Tahun 2005 Pasal 25 Ayat 1, standar kompetensi kelulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.¹⁵

Penelitian ini membahas tentang pencapaian standar kompetensi lulusan artinya tidak hanya kompetensi sebagaimana dalam standar isi saja, akan tetapi juga meneliti tentang implementasi kurikulum muatan lokal berbasis agama di MA NU TBS Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus ?
2. Bagaimanakah Standar Kompetensi kelulusan Muatan Lokal Berbasis Agama di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus ?
3. Bagaimanakah Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama untuk mencapai Kompetensi Lulusan di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum muatan lokal berbasis agama di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus.
2. Untuk mengetahui bagaimana standar kompetensi lulusan muatan lokal berbasis agama di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus.

¹⁵ Fatah Syukur, *Teknologi Pendidikan*, Semarang, 2005, hlm. 54.

3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kurikulum muatan lokal berbasis agama untuk mencapai kompetensi kelulusan di Madrasah Aliyah NU TBS Kudus.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum di madrasah sebagai bagian bidang manajemen pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat untuk Madrasah

Manfaat praktis penelitian ini dapat dimanfaatkan pada Madrasah Aliyah NU TBS Kudus dan MA yang ada agar mampu mengimplementasikan kurikulum muatan lokal berbasis agama.

b. Manfaat untuk Pengambil Kebijakan

manfaat praktis dapat digunakan sebagai bahan masukan Departemen Agama dan lembaga pendidikan dalam kebijakan penetapan dan bahan evaluasi kurikulum.

F. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika dalam penelitian Tesis ini meliputi :

BAB I Pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, batasan masalah atau fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tesis.

Bab II Landasan Teori, yang meliputi : A) Pengertian Kurikulum B) Landasan Kurikulum yang meliputi 1) Landasan Filosofis, 2) Landasan Psikologis, 3) Landasan Sosial Budaya, 4) Landasan Ilmu Pengetahuan 5) Tujuan Kurikulum C. Fungsi Kurikulum, D) Komponen Kurikulum , yang meliputi; 1) Komponen Tujuan, 2) Komponen Isi/Materi, 3) Komponen Strategi , 4) Komponen Evaluasi , E) Muatan Lokal yang meliputi 1) Pengertian Muatan Lokal, 2) Pengertian Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama, 3) Dasar dan Tujuan Muatan Lokal Berbasis Agama, 4) Muatan Lokal Berbasis Agama, F) Pengembangan Kurikulum yang meliputi 1) Tujuan Pengembangan Kurikulum, 2) Fungsi Pengembangan Kurikulum, 3) Standar Kompetensi Lulusan, G) Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah, H) Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yang meliputi; A) Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis Penelitian , B) Pendekatan Penelitian Lokasi Penelitian, C) Penelitian Kualitatif, D) Subjek dan Objek Penelitian, E) Teknik Pengumpulan Data yang meliputi 1) Pendekatan Penelitian, 2) Teknik Pengumpulan Data, yang meliputi (a) Observasi (Pengamatan), (b) Wawancara , (c) Dokumentasi, (d) Teknik Pengumpulan Data, (e) Pengujian Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang meliputi A) Gambaran umum MA NU TBS Kudus, B) Sejarah Berdirinya MA NU TBS Kudus , C) Asas, Visi, Misi dan Tujuan MA NU TBS Kudus, yang meliputi 1) Asas / Landasan Ideologi Madrasah 2) Visi Madrasah, 3) Misi Madrasah (4) Tujuan Pendidikan Madrasah (5) Manajemen Madrasah, yang meliputi : a) Kurikulum,

b) Tenaga Pendidik dan Kependidikan, c) Kegiatan Pembelajaran. D) Deskripsi Hasil Penelitian, yang meliputi: 1) Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Agama 2) Standar Kompetensi Kelulusan Muatan Lokal Berbasis Agama di MA NU TBS Kudus. 3) Implementasi Muatan Lokal Berbasis Agama dalam mencapai Standar Kompetensi MA NU TBS Kudus.

Bab V Penutup, yang meliputi : kesimpulan dan saran-saran.

